

Program Selaparang Inklusi

Baik bagi Mataram Tapi Perlu Payung Hukum untuk Keberlanjutannya



INKLUSI PEREMPUAN - Noviani Danar Kinnastri, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram terjun langsung di area pengembangan pangan lestari. Beberapa giat ini digawangi Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat. KWT tumbuh pesat di hampir semua kelurahan di Kecamatan Selaparang (Antara, 19/12/2022)

Ringkasan Eksekutif

Selaparang Inklusi berkontribusi besar meningkatkan akses pelayanan publik bagi disabilitas, anak perempuan dan lansia. Berangkat dari kegelisahan dibarengi tindakan kolaboratif dan partisipasi komunitas, program ini berjalan dengan baik. Tapi masa depan program ini dikuatirkan karena tidak ada regulasi dan keterbatasan pendanaan.

Selaparang Inklusi adalah program inovatif berorientasi pemenuhan akses kelompok disabilitas, perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan publik berkualitas di Kecamatan Selaparang. Program ini bertujuan membangun kesadaran inklusif, perluasan ruang partisipasi, membangun kolaborasi multipihak, pemetaan potensi wilayah dan menysasar kelompok yang rentan (disabilitas, perempuan anak, lansia dan kelompok rentan tereksklusi lainnya).

Mengingat tantangan Program Selaparang Inklusi yang makin kompleks dan kebutuhan akan perluasan dampak positif hingga level Kota Mataram pada masa datang, perlu di susun sebuah regulasi atau pedoman pelaksanaan yang lebih mekanistik dan mudah dijalankan oleh semua dibarengi pendanaan yang memadai dari APBD agar terjamin keberlanjutannya.

Pendahuluan

Kecamatan Selaparang, pada mulanya memiliki keterbatasan akan ruang atau pelayanan publik untuk disabilitas. Selain itu, dalam konteks programatik sejumlah lurah kebingungan memetakan masalah dan potensi khas yang dimiliki untuk bergerak lebih maju dan lebih inklusif. Sementara perempuan, disabilitas, anak, lansia dan masyarakat miskin di sembilan kelurahan butuh akselerasi pemberdayaan. Komunitasnya cukup banyak dan menunggu sentuhan midas pemerintah kecamatan.

Zulkarwin, Camat Selaparang bersama sejumlah pegiat sosial menyadari perlu konsep dan tindakan yang nyata untuk menangani persoalan ini. Didampingi Romi Hidayat, Direktur Yayasan Rumah Senja dan dukungan Pemerintah Kota Mataram, mulai diluncurkan Program Selaparang Inklusi. Pasca diluncurkan, demi memenuhi hasrat pelayanan optimal untuk disabilitas, dilakukan pelatihan bahasa isyarat untuk staf kecamatan dan sembilan kelurahan di dukung oleh Yayasan Harapan Baru Lombok.

Program ini dianggap berjalan dengan baik selama dua tahun meski tanpa regulasi formal dan anggaran program dari APBD. Fenomena ini menarik sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif. Formula apa yang membuat program ini berjalan baik meski tanpa regulasi formal dan anggaran khusus dari APBD. Kajian ini mendesak dilakukan demi menilai secara obyektif pelaksanaan program dari berbagai sudut pandang.

Lebih khusus, penelitian sejatinya bertujuan untuk melakukan evaluasi berbasis bukti terhadap pelaksanaan Program Selaparang Inklusi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pada level teknis diharapkan terkumpul data dan informasi perkembangan Program Selaparang Inklusi dan adanya rumusan model replikasi Selaparang Inklusi di level Kota Mataram.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan Program Selaparang Inklusi. Masalah utama yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran pelaksanaan Program Selaparang Inklusi dilihat dari sisi input, proses, dampak, aktor pendukung dan penghambatnya serta kontribusinya bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Selaparang. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil evaluasi yang obyektif, data yang akurat dan informasi yang bernas mengenai pelaksanaan Program Selaparang Inklusi. Selain itu, penelitian diharapkan menghasilkan rumusan model inovasi kecamatan inklusif untuk direplikasi di kecamatan lain di Kota Mataram.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Studi Evaluasi Kebijakan. Ini adalah penelitian yang menggunakan prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial (Rossi dan Freeman, 1985).

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi, kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan, apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah para peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal utama yang ingin diketahui terkait dengan pelaksanaan Program Selaparang Inklusi. Selanjutnya peneliti mengembangkan panduan pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lainnya sesuai dengan kondisi penelitian di lapangan.

Hasil/Temuan

Kolaborasi, Partisipasi dan Akses Makin Terbuka

Selaparang Inklusi adalah program inovasi yang memberi akses, ruang dan kesempatan yang sama bagi warga untuk terlibat dalam pembangunan berbasis potensi spesifik masing-masing kelurahan. Program ini pada awalnya tidak jelas konsep dan tujuannya. Namun pelan tapi pasti

dengan mengarusutamakan kolaborasi, partisipasi dan kesetaraan antara pemerintah kecamatan, kelurahan dan masyarakat sipil program ini dinilai berhasil. Diawali dengan pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan kelurahan dan kecamatan program ini bergulir tanpa anggaran dan sumber daya.

Program Selaparang Inklusi telah meningkatkan kesadaran inklusi di kalangan pemerintah kelurahan dan komunitas melalui berbagai kegiatan yang diintegrasikan dengan program yang sudah ada. Kelompok disabilitas, perempuan, lansia, anak dan masyarakat miskin merasa pemerintah hadir ditandai dengan terbukanya kesempatan, ruang dan akses layanan publik terjangkau. Di Kelurahan Karang Baru misalnya, akses disabilitas untuk pengguna kursi roda dan toilet yang ramah disabilitas dan anak terasa manfaatnya. Di Kelurahan Monjok komunitas disabilitas mendapat mengakses wi-fi gratis dan berugak tempat kumpul teman tuli.

Beberapa kelurahan lain juga menjalankan Program Selaparang Inklusi yang tak kalah kreatifnya. Kelurahan Dasan Agung Baru misalnya melibatkan lansia untuk mengolah sampah menjadi pupuk yang bernilai ekonomi, didukung Yayasan Rumah Senja. Tetapi aktor kunci yang perannya dominan adalah Camat Selaparang sebagai penggagas, Yayasan Rumah Senja sebagai pendamping dan sembilan lurah sebagai implementor. Program Selaparang Inklusi kemudian dikolaborasikan dengan program yang sudah ada untuk memperkuat Kelompok Wanita Tani (KWT), UMKM, dan Pengembangan teknologi tepat guna dan lain sebagainya.

Sejumlah penerima manfaat Program Selaparang Inklusi mengakui ada dampak signifikan yang dirasakan mulai dari manfaat individu dengan terciptanya kemudahan berusaha melalui budidaya maggot, pengolahan sampah jadi pupuk dan UMKM. Ruang partisipasi, meningkatnya kapasitas diri, adanya pengakuan atas keterlibatan dan tersedianya kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Lingkungan yang terasa lebih bersih dan keberpihakannya nyata pada disabilitas, perempuan, anak, lansia dan masyarakat miskin juga diakui sebagai dampak nyata program ini.



Penjelasan Gambar: 1. Indikator pelayanan publik yang inklusif difokuskan pada keberterimaan (aksesibilitas), partisipasi yang luas dan pelayanan yang setara/non diskriminasi. 2. Pelayanan publik yang inklusif harus dapat diakses dengan baik oleh disabilitas, perempuan, anak, lansia dan masyarakat miskin. 3. Pendekatan dalam pelaksanaan adalah kolaborasi multipihak antara pemerintah dengan pemerintah. Sektor usaha, NGO, Kampus, dan komunitas. 4. Namun semua harus dipayungi oleh regulasi berisi juklak/juknis, SDM, dan skema pembiayaan/anggaran. 5. Dengan demikian pelayanan publik yang inklusif terjamin kepastiannya, berkelanjutan dan mengarah pada pencapaian visi Mataram.Harum

Kendala dan Tantangan Keberlanjutan

Dibalik dampak positif Program Selaparang Inklusi, ada kendala dan tantangan yang menghadang. Terutama masalah ketiadaan indikator untuk mengukur keberhasilan dampak program, tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan program. Selain itu tidak tersedianya anggaran khusus untuk memastikan program ini berkelanjutan dan dapat direplikasi di tingkat Kota Mataram juga jadi kendala. Jika regulasi dan anggaran tersedia dibarengi sikap warga yang inklusi serta pemerintah yang terbuka maka harapan untuk mencapai Kota Mataram yang Harum dan Inklusif akan lebih cepat dan mudah.

Tawaran Model Pelayanan Publik Inklusif

Embrio pelayanan publik yang inklusif di Kecamatan Selaparang setidaknya tergambar cukup jelas pada sikap dan perilaku aparatur yang adaptif. Kelompok sasaran merasakan dampak dari meningkatnya kapasitas aparatur ditingkat kelurahan. Hal ini menghadirkan empati dalam interaksi antara aparatur dan warga. Pada masa yang akan datang di Kota Mataram ini dapat menjadi model pelayanan publik yang inklusif, sebuah pendekatan pelayanan yang memberikan akses dan kemudahan pada semua warganya khususnya disabilitas, anak, perempuan, lansia dan masyarakat miskin.



Penjelasan gambar : 1. Konsep Mataram Inklusif berisi nilai dasar berupa akses, ruang dan kesempatan yang lebih luas dalam pembangunan untuk disabilitas, perempuan, anak, lansia dan masyarakat miskin. 2. Pendekatan Program yang mengandalkan Colaboratif Governance. 3. Ditunjang oleh daya dukung political will yang baik, regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat dan sinergis, dan ketersediaan anggaran. 4. Strategi yang digunakan adalah pemberdayaan, partisipasi, kolaborasi multipihak. 5. Pelayanan publik yang inklusif untuk disabilitas, perempuan, anak, lansia dan masyarakat miskin. 6. Pelayanan publik yang inklusif berkontribusi pada pencapaian visi Mataram Harum yang lebih inklusif.

Rekomendasi

- a. Untuk memastikan program memberi dampak terhadap kelompok sasaran dan organisasi, perlu penyusunan indikator capaian program. Indikator ini akan mengoptimalkan kinerja dan upaya replikasinya.
- b. Demi memastikan pelaksanaan Program Selaparang Inklusi dan replikasi yang lebih luas serta agar dapat dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah maka diperlukan regulasi berupa pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta menuangkan program Selaparang Inklusi dalam APBD.
- c. Diperlukan penguatan kelembagaan Selaparang Inklusi dengan mengoptimalkan tim implemendor yang tersedia. Lebih efektif memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah ada melalui intervensi program dibanding pembentukan kelembagaan baru tanpa diikuti distribusi keuangan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Stufflebeam, D. (2003). The CIPP model of evaluation. In T. Kellaghan, D. Stufflebeam & L. Wingate (Eds.), Springer international handbooks of education: International handbook of educational evaluation.
- Lewis, W Carol. Gilman, S Stuart (2005). The Ethics Challenge In Public Serviv. Second Edition. Jossey Bass. San Francisco.
- Gidley, J, Hampson, G, Wheeler, L And Bereded-Samuel, E 2010, 'Social Inclusion: Context, Theory And Practice', The Australasian Journal Of University-Community Engagement, Vol. 5, No. 1.
- Syahra, Rusydi. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi Dan Kemiskinan. Jurnal Masyarakat Dan Budaya.
- World Bank. (2013). What Do We Mean By Social Inclusion. https://Elibrary.Worldbank.Org/Doi/10.1596/978-1-4648-0010-8_Ch1.
- Jati, R Wasisto. (2014). Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 18, Nomor 1, Juli 2014 (66-79)
- Lawang, Mz Robert. (2014). Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial Di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Nomor 2, Volume I.
- Hery Kurnia Sulistyadi. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo.
- Zakiyah, Ummi. Husein R. Muzwardi. (2017). Pelayanan Suminar, R. E. (2015). Identifikasi Kemudahan Penyandang Difabilitas dalam Melakukan Pergerakan dengan Menggunakan Moda Transportasi. INKLUSI, 2(1), 155-192.
- Inklusif Untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas Dan Aksesibilitas Pariwisata Untuk Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Prosiding Konferensi Nasional Ke- 4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM).
- Salim, I, Syafi'i, M., & Elisabeth, N. (2015). Indonesia dalam Desa Inklusi. Sleman, Yogyakarta: Sigab. Setidaknya 18.800 orang masih dipasung di Indonesia. (2016, March 21). Retrieved 20 January 2017, from http://www.bbc.com/berita_indonesia/indonesia_hrw_pasung.
- Yogyakarta Bertekad Jadi Kota Inklusi. (2016, November 16). Retrieved 13 Januari 2017, from <http://mediaindonesia.com/news/read/77714/yogyakarta-bertekad-jadi-kota-inklusi>.
- Simarmata Rikardo, Zakaria Yando. (2017). "Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Desa Perspektif Inklusi Sosial Dalam." *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*.
- Maftuhin, Arif, 2017, Mendefinsikan Kota Inklusif : Asal Usul, Terori dan Indikator, Jurnal Tata Loka Volume 19 Nomor 2 Mei 2017. Diakses 06 April 2021 <https://artikelpendidikanberkualitas.blogspot.com/2017/11/>.
- Hasan Baharun, Robiatul Awwaliyah. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. *Jurnal Program Studi PGMI*, 5 (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2009. Tentang. Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.